

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di berbagai negara-negara di dunia dihadapkan pada masalah lingkungan yang hebat, baik yang terjadi di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Ironisnya, dalam dunia yang didalamnya telah berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebetulnya akan membawa perbaikan kehidupan masyarakat namun justru sebaliknya yang terjadi. Imbas negatif pembangunan yang dilaksanakan telah dirasakan oleh daerah yang bersangkutan dan kemudian menyebar ke daerah lain tanpa ada pemecahan yang efektif, pertumbuhan pesat terutama dikawasan wilayah perkotaan, tidak terkecuali perkembangan kota-kota besar di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa wilayah kota pada umumnya dipandang sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pendidikan, pusat pemerintahan dan sebagainya. Akibatnya adalah terkonsentrasinya jumlah penduduk yang hidup di wilayah kota.

Pertambahan penduduk kota baik secara alamiah maupun secara migrasi, tidak hanya menyebabkan wilayah kota menjadi berkembang tetapi juga menuntut tersedianya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai guna memenuhi kebutuhan penduduk dengan berbagai macam karakteristik dan kegiatan. Di lain pihak kebutuhan akan sarana dan prasarana perkotaan seperti perumahan, jalan dan sebagainya belum terpenuhi secara menyeluruh karena terbatasnya daya

dukung kemampuan pemerintah wilayah kota untuk membiayai pembangunan berbagai sarana dan prasarana wilayah perkotaan.

Terkonsentrasinya jumlah penduduk yang hidup di wilayah kota saling menimbulkan berbagai masalah perkotaan yang kompleks seperti menurunnya kualitas lingkungan, timbulnya kerawanan sosial, masalah pemukiman kumuh dan sebagainya juga dapat berakibat buruk terhadap perkembangan daerah sekitarnya, sehingga perencanaan wilayah kota, dalam kaitannya perkembangan wilayah kota menjadi sangat penting artinya terutama untuk mengatasi masalah-masalah wilayah perkotaan yang mungkin lebih berat dimasa mendatang. Selain itu perkembangan wilayah kota yang sedemikian pesatnya memerlukan penataan ruang yang serasi diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah perkotaan yang memadai. Semua ini harus dituangkan dalam satu sistem wilayah kota yang menyeluruh dan terpadu.

Berhasil tidaknya perencanaan wilayah kota dalam pengimplementasiannya sangat tergantung pada pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan yang telah disusun, antara lain pemerintah daerah, para perencana dan masyarakat itu sendiri. Dokumen tata ruang yang memiliki tujuan untuk mengatur ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan untuk mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, serta untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan, untuk itu perlu dilakukan evaluasi agar dokumen tata ruang dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan, baik tingkat pusat maupun tingkat

daerah seharusnya sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Di dalam subsistem tersebut, terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. Namun, realitasnya rencana tata ruang yang telah ditetapkan seringkali tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini dikarenakan antara lain belum terbinaanya sistem politik pembangunan yang mampu mewadahi penyelenggaraan tata ruang sebagaimana mestinya atau sebagaimana asasnya. Oleh karena itu, berbicara masalah tata ruang harus diluruskan pada suatu kerangka pemikiran tentang bagaimana tata ruang seharusnya terselenggara sesuai dengan asasnya.

Pengembangan wilayah merupakan upaya mengintegrasikan secara harmonis sumber sumber daya alam, manusia dan teknologi dengan memperhatikan data tampung lingkungan sehingga meningkatkan kesejahteraan wilayah dan memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.

Pemerintah kabupaten Malaka telah menetapkan peraturan daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2007 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam RTRW tersebut telah dilakukan pengaturan tentang program dan kegiatan pembangunan dengan memperhatikan aspek geostrategis, kondisi kawasan topografi, potensi lahan, peternakan dan pertanian, serta kegiatan usaha kecil masyarakat.

Adanya rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten malaka yang merupakan rencana penataan ruang wilayah perkotaan kabupaten malaka. Pengaturan struktur ruang yang terintegrasi dengan percepatan proyek strategis nasional. Berdasarkan peraturan pemerintah penyelenggaraan penataan ruang, terdapat muatan revisi RTRW yang meliputi struktur ruang sistem pemukiman,

sistem jaringan transportasi, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan SDA. Namun demikian kabupaten Malaka komoditi unggulannya yaitu padi, kacang hijau, jagung, pusat pendidikan, wisata Bahari dan perikanan tambak sepanjang pesisir. Adapun Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) kabupaten Malaka yaitu kejadian putusnya jembatan numponi mengakibatkan beberapa wilayah menjadi terisolasi. Pada saat musim hujan, masyarakat pada wilayah yang terisolasi tersebut harus menempuh perjalanan yang lebih panjang untuk menuju ke ibu kota kabupaten, yaitu melewati ruas jalan Umasukaer-Nurobo. Selain jarak tempuh yang lebih panjang, kondisi jalan Umasukaer-Nurobo saat ini masih dalam kondisi rusak berat, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama menuju ke ibu kota kabupaten.

Putusnya jembatan numponi sangat berdampak pada terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitar jembatan tersebut. Keadaan jembatan numponi sangat mempengaruhi aktifitas manusia, barang dan jasa, mengakibatkan beberapa wilayah menjadi terisolasi, dan berpengaruh negatif terhadap kemampuan sosial ekonomi masyarakat pengguna jembatan, dan secara jangka panjang akan mempengaruhi aktivitas ekonomi serta sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar jembatan tersebut dan kabupaten malaka pada umumnya. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten malaka melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten malaka bermaksud melaksanakan konsultasi perencanaan dan studi kelayakan pembangunan jembatan numponi yang berlokasi di desa numponi, kecamatan malaka timur kabupaten Malaka sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pembangunan jembatan untuk kepentingan umum.

Wilayah kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka telah memiliki perencanaan pengembangan wilayah yaitu keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang dimaksudkan disini adalah bahwa perencanaan pengembangan wilayah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian, keselarasan antara manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antar kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

Perencanaan pengembangan wilayah kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka pada hakekatnya merupakan jawaban atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan merupakan hasil dari suatu proses perencanaan dengan mengalokasikan pemanfaatan ruang, obyek-obyek fisik dan aktivitas kawasan kota. Proses tersebut meliputi: pengalokasian aktivitas kota sesuai dengan hubungan fungsionalnya. Pengadaan atau penyediaan fisik lahan kota untuk menjawab kebutuhan akan ruang aktivitas seperti tempat kerja, tempat tinggal, transportasi dan komunikasi. Pengadaan jalan dan prasarana umum merupakan faktor pendukung kegiatan aktivitas perkotaan. Proses pengadaan dan pengalokasian tata ruang akan terkait dengan bagian-bagian permukaan bumi, tempat berbagai aktivitas dilakukan serta bagian dalam wawasan intergratif. Perencanaan tata ruang memiliki arti penataan segala sesuatu yang berada didalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan. Dalam perencanaan tata ruang mencakup proses bagaimana mendistribusikan tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan hidupnya.

Mengenai objek penelitian ini dilakukan di kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka, yang merupakan satu kecamatan yang terdiri dari sembilan

desa. Berdasarkan fenomena yang terjadi maka adanya masalah dalam perencanaan pengembangan wilayah terpadu (PPWT) Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka yaitu seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, kurangnya sumber daya manusia (SDM) sehingga dalam pelaksanaan pembangunan kurang efektif. Namun ada juga masalah lain seperti Ketidaksesuaian program pembangunan yang disusun dengan kebutuhan aspirasi dan karakteristik budaya, kurang merangsang kreativitas aparat dalam upaya mencari ide-ide atau strategi pembangunan untuk mendukung perkembangan daerah. Namun ada juga aspek lain yang menghambat perencanaan pengembangan wilayah Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka yaitu seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan maka dari itu pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan wilayah terpadu (PPWT). Dari sini dapat kita lihat luas kecamatan Laen Manen Menurut sembilan Desa dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Luas Kecamatan Laen Manen Menurut Desa

No	Desa	Ibukota	Luas Daerah (km ²)
1	Tniumanu	Tniumanu	13,18
2	Uabau	Sanses	12,80
3	Bonibais	Rafau	5,37
4	Nauke Kusa	Kakuun	15,00
5	Kapitan Meo	Eokpuran	7,38
6	Tesa	Bora	7,38
7	Meotroy	Nurobo	7,31
8	Bisesmus	Klatun	12,80
9	Oenaek	Fafoik	12,80
Jumlah			94,02

Sumber data: Kantor Camat Laen Manen

Pada tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa kecamatan Laen Manen memiliki 9 desa yang terdiri dari Desa Tniumanu, Desa Uabau, Desa Bonibais, Desa Nauke Kusa, Desa Kapitan Meo, Desa Tesa, Desa Meotroy, Desa Bisesmus dan Desa Oenaek dengan total luas wilayah keseluruhan adalah 94,02 km². Luas wilayah kecamatan adalah besaran daerah yang menjadi teritorial dari sebuah kecamatan. Namun dengan begitu kecamatan Laen Manen memiliki perencanaan pengembangan wilayah yaitu seperti keserasian, keselarasan antara manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Disini juga ada yang menghambat perencanaan pengembangan wilayah yaitu seperti kurangnya sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dan ketidaksesuaian program pembangunan yang disusun dengan kebutuhan aspirasi dan karakteristik budaya.

Tabel 1.2
Data Potensi kecamatan Laen Manen

No	Jenis Tanaman	Luas Area (ha)	Produksi (ton)
1	Padi Sawah	120,70 ha	526, 25 ton
2	Padi Ladang	83 ha	127,82 ton
3	Jagung	1145 ha	3904 ton
4	Kedelai	0	0
5	Kacang Tanah	3 ha	0
6	Kacang Hijau	70 ha	34 ton
7	Ubi Kayu	350 ha	3266 ton

Sumber data: Kantor Camat Laen Manen

Dari tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa kecamatan Laen Manen rata-rata masyarakat memproduksi bahan makanan seperti padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi kayu untuk di jadikan modal dasar

yang nantinya dapat dikelola dan juga dikembangkan demi kepentingan, keberlangsungan dan juga perkembangan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik dan merasa perlu mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “Perencanaan Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah perencanaan pengembangan wilayah terpadu (PPWT) Kecamatan Laen Manen kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pengembangan wilayah terpadu (PPWT) Kecamatan Laen Manen kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat menambah wawasan, pengetahuan dan mampu memberikan sumbangsih pemikiran tentang suatu konsep dalam hal untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya tentang konsep perencanaan pengembangan wilayah terpadu (PPWT) di setiap Wilayah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh masyarakat secara umum, dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan mengenai

Perencanaan Pengembangan Wilayah terpadu Kecamatan Laen Manen
kabupaten malaka.